



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : USWATUN HASANAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 124437

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.286.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/170 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000		
2. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 596 m2/596 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.500.000
1. MOBIL, HRV MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, SCOPPY F1C02N28L0 A/T /SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.065.816
F. HARTA LAINNYA	Rp.	20.000.000
Sub Total	Rp.	1.607.565.816
III. HUTANG	Rp.	1.513.873.637
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	93.692.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.